

## ESCOMPTOBANK NV TAHUN 1955-1958

**Nina Kurnia**

Jurusan Pendidikan Sejarah  
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: Kurnianina64@gmail.com

**Corry Liana**

S-1 Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
Email: corryliana@unesa.ac.id

### Abstrak

Escomptobank NV. adalah bank dagang Belanda yang membuka kantor cabangnya di Indonesia. Awal berdirinya hanya membuka cabang di Belanda dan Batavia, namun seiring dengan berkembangnya ekonomi Indonesia bank tersebut membuka cabang di berbagai kota di Indonesia seperti Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Medan. Kegiatan utama Escomptobank NV adalah wesel dan diskonto surat berharga. Escomptobank NV. merupakan bank yang dinasionalisasikan menjadi bank milik Indonesia. Di kota Surabaya Escomptobank NV. menjadi salah satu bank yang turut membantu dalam perkembangan perekonomian kota Surabaya. Rumusan masalah dalam penelitian ini; (1) bagaimana keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1955-1957 (2) Bagaimana proses berubahnya Escomptobank NV menjadi PT Escomptobank yang statusnya menjadi perseroan terbatas pada tahun 1958. Metode penelitian sejarah heuristik (pengumpulan sumber). heuristik di dapatkan peneliti di ANRI, Museum Bank Mandiri di Jakarta dan Surabaya, Badan Arsip Perpustakaan Kota Surabaya, Dinas Perpustakaan. Setelah dikeluarkannya undang-undang pokok bank Indonesia tahun 1953, Bank Indonesia sebagai lembaga sangat berkepentingan dengan lahirnya ketentuan tentang pengawasan bank melakukan penelitian dan pengkajian atas ketentuan serupa yang berlaku di berbagai negara, terutama Belanda. Dikeluarkannya PP No.1 Tahun 1955, bank-bank swasta nasional yang telah ada dalam waktu tiga bulan wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada menteri keuangan melalui bank Indonesia. Berdasarkan analisis sumber yang ada, setelah perundingan KMB Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tapi negara harus membayar hutang Belanda, perusahaan asing masih terus beroperasi di Indonesia membuat perekonomian tidak stabil. upaya untuk menstabilkan ekonomi Indonesia sebagai negara baru dan melepaskan diri dari pengaruh asing, pemerintah menasionalisasikan perusahaan asing yang masih beroperasi di Indonesia termasuk Escomptobank NV.

**Kata Kunci:** *Escomptobank NV, Ekonomi Indonesia, Bank Belanda*

### Abstract

*Escomptobank NV. is a Dutch trading bank which opened a branch office in Indonesia. Initially, it only opened branches in the Netherlands and Batavia, but along with the development of the Indonesian economy, the bank opened branches in various cities in Indonesia such as Surabaya, Semarang, Yogyakarta, and Medan. Escomptobank NV's main activity is notes and discounts on securities. Escomptobank NV. is a bank that was nationalized to become a bank owned by Indonesia. In the city of Surabaya Escomptobank NV. became one of the banks that helped in the economic development of the city of Surabaya. The formulation of the problem in this study; (1) how was the condition of the Indonesian economy in 1955-1957 (2) how was the process of changing Escomptobank NV to PT Escomptobank whose status was a limited liability company in 1958. Heuristic historical research method (collection of sources). Heuristics were obtained by researchers at ANRI, Bank Mandiri Museum in Jakarta and Surabaya, Surabaya City Library Archives Agency, Library Service. After the issuance of the basic law on Bank Indonesia in 1953, Bank Indonesia as an institution was very interested in the issuance of provisions on bank supervision to conduct research and study on similar provisions that apply in various countries, especially the Netherlands. With the issuance of PP No.1 of 1955, national private banks that have existed within three months are required to apply for a business license to the minister of finance through Bank Indonesia. Based on the analysis of existing sources, after the Dutch KMB negotiations recognized Indonesia's independence, but the state had to pay the Dutch debt, foreign companies continued to operate in Indonesia, making the economy unstable. In an effort to stabilize the Indonesian economy as a new country and escape foreign influence, the government nationalized foreign companies still operating in Indonesia, including Escomptobank NV.*

**Keyword:** *Escomptobank NV, Indonesia Economy, dutch bank*

## PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia pada pertengahan abad ke-19 dan awal abad ke-20 mengalami perkembangan yang sangat bagus. Menurut tahapan mengenai proses pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Rostow, posisi ekonomi Indonesia pada saat itu sudah berada pada *tahap preconditions for take off*.<sup>1</sup> Perkembangan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari skala nasional saja, namun juga bisa dilihat dari skala regional yang ada di Indonesia. Setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki keunikan tersendiri dalam perkembangan ekonominya. Baik sebagai kota perdagangan, kota penghasil perkebunan, dan penghasil komoditi ekspor, dan sebagai kota transit perdagangan.

Keresidenan Surabaya merupakan salah satu dari tujuh keresidenan di Jawa Timur yang mengalami perkembangan ekonomi signifikan<sup>2</sup>. Tahun 1950an keresidenan ini menjadi kawasan penting dalam penghasil komoditi ekspor, industri, mau pun perdagangan. Surabaya memasuki era baru dalam sejarah perekonomiannya terbuka lebar bagi masuknya modal swasta, dan pemerintah kolonial Belanda menawarkan suatu iklim bisnis yang lebih menarik bagi investor asing<sup>3</sup>. Pada masa-masa ini para pemilik modal mulai banyak menginvestasikan modalnya pada sektor perkebunan dan perdagangan. Dengan banyaknya investasi masuk menjadikan Surabaya sebagai kota perdagangan penting khususnya dalam perdagangan internasional<sup>4</sup>.

Perkembangan dalam sektor perkebunan dan perdagangan melahirkan berkembangnya sektor-sektor yang lain salah satunya ialah perbankan, karena modal yang dimiliki oleh rakyat terbatas menuntut mereka untuk mencari modal berupa pinjaman pada bank asing. Perbankan merupakan salah satu wadah yang digunakan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, salah satu bank asing yang mendirikan cabangnya di Indonesia ialah *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* atau disingkat

NIEM<sup>5</sup>. Pada awalnya perusahaan ini merupakan perusahaan dagang yang berdiri tahun 1857 oleh pengusaha Belanda bernama Paulus Tiedeman Jr. dan Carl Frederik Wihelm Wiggers Van Kerchen di Batavia, dan baru membuka cabang di Surabaya pada tahun 1928 yang diarsiteki oleh orang Belanda yang bernama Marius J. Hulswit. Beliau juga yang merancang bangunan-bangunan bank Escompto lainnya seperti di Yogyakarta, Bandung, Batavia, dan Semarang. Salah satu bangunan hasil rancangannya yang ada di kota Surabaya ialah bangunan De Javasche Bank yang letaknya tidak jauh dari bank Escompto<sup>6</sup>. Bank Escompto memiliki sejarah yang sangat panjang di Indonesia mulai yang awalnya merupakan perusahaan dagang milik swasta hingga berubah menjadi perusahaan milik Negara.

Berdirinya *Nederlandsch Indische Escompto Bank* merupakan bentuk respon atas berkembangnya kegiatan ekonomi dan pembukaan perkebunan swasta di Hindia Belanda. Dampak dari berlakunya sistem tanam paksa dan berlakunya Undang-undang Agraria yang dikeluarkan tahun 1870. Kegiatan utama dari Bank NIEM ialah wesel dan diskonto surat berharga seperti kegiatan bank masa itu. Perkembangan perekonomian di Indonesia selepas kemerdekaan membuat bank NIEM mengalami banyak perubahan, baik dalam segi nama atau pun status. Pada tahun 1951 pemerintah Indonesia membentuk Bank Industri Negara yang terwujud pada tanggal 4 April 1951. Tertulis dalam Undang-Undang Darurat RI nomor 5 tahun 1952 tertanggal 29 Februari 1952 pasal 15.

Hal-hal yang mempengaruhi pemerintah untuk mendirikan badan pembiayaan seperti BIN karena adanya kebutuhan pasca Konferensi Meja Bundar. Pada tahun 1949 kehidupan perekonomian Indonesia atas sektor perkebunan, pertambangan, pelayaran, perkapalan, perindustrian, dan perbankan masih di kuasai oleh Belanda sehingga perekonomian Indonesia masih tidak stabil. Dengan seperti itu pemerintah Indonesia berupaya untuk mengambil alih aset-aset yang masih di kuasai oleh Belanda. Pada tahun 1955 pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang berisi tentang semua bank swasta nasional wajib melakukan permohonan ijin usaha yang disetujui oleh menteri keuangan. Pada tahun 1956 pemerintah Indonesia secara sepihak melakukan pembatalan atas hubungan Indonesia Belanda berdasarkan perijinan KMB, sehingga berdampak di nasionalisasikannya Bank dan Perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia. Tuntutan rakyat Indonesia pada pemerintah yang selanjutnya ialah menyatukan

<sup>1</sup> W.W. Rostow membagi tahapan proses pertumbuhan ekonomi semua masyarakat kedalam lima kategori yakni : *the traditional society; the preconditions for take-off; the take-off; the drive to maturity; and the age of high mass-consumption*. Pembagian ini dikemukakannya sebagai sebuah reaksi terhadap proposisi sebelumnya yang dikemukakan oleh mark yakni; *feudalism; Bourgeois Capitalism; Socialism; and Communism*. Lihat W.W. Rostow, *The Stages of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1973)

<sup>2</sup> Nasution, "Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)", (Surabaya: Intelektual, 2006). Hlm. 2.

<sup>3</sup> J. Thomas Lindblad, "The Contribution of Foreign Trade to Colonial State Formation in Indonesia 1900-1930", dalam *Political And Economic Foundations of The Netherlands Indies 1880-1942* (Leiden : KITLV Press, 1994), hlm. 24.

<sup>4</sup> Andrian Clemend, J. Thomas Lindblad, Jeroen Touwen, *Changing Economy in Indonesia*, Vol. 12 b, (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1992), hlm. 28.

<sup>5</sup> <https://achmadrizal.staff.telkomuniversity.ac.id/bank-escompto-bank-dagang-negara-sampai-bank-mandiri/>

<sup>6</sup> [https://www.kompasiana.com/jelajah\\_nesia/552e29cc6ea83417128b457f/jejak-sejarah-bank-mandiri-di-surabaya](https://www.kompasiana.com/jelajah_nesia/552e29cc6ea83417128b457f/jejak-sejarah-bank-mandiri-di-surabaya)

kembali Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Pada penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan jaman juga telah dibentuk beberapa lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan perbankan seperti baik yang sifatnya sementara (temporary) maupun yang masih ada hingga saat ini, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembaharuan terhadap kegiatan perbankan lainnya.

NIEM adalah salah satu bank swasta yang dinasionalisasikan oleh pemerintah, sebelum dinasionalisasikan bank ini mengalami beberapa perkembangan dan perubahan karena kebutuhan yang ada. Nama *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* berubah menjadi Escomptobank NV pada tahun 1949. Setelah mengalami perubahan nama pada tahun 1949, perusahaan itu mengalami perubahan nama kembali menjadi PT. Escomptobank sekaligus perubahan status menjadi perseroan terbatas pada tahun 1958. Berdasarkan pemaparan tersebut maka kami menyimpulkan beberapa rumusan yang akan di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimana keadaan Escomptobank NV. tahun 1955-1957. (2) Bagaimana proses berubahnya Escomptobank NV. menjadi PT. Escomptobank yang statusnya menjadi perseroan terbatas tahun 1958

## METODE

Penelitian ini membahas tentang proses bagaimana upaya pemerintah Indonesia mengambil alih aset-aset Belanda yang ada di Indonesia. Setelah kemerdekaan perekonomian Indonesia masih banyak yang dimiliki oleh Belanda, seperti Perkebunan, pelayaran, perkapalan, pertambangan, hingga perbankan masih dikelola oleh Belanda. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode dalam penelitiannya yaitu heuristik, kritik, interpretasi, historiografi. Dalam penelitian, metode adalah cara atau prosedur untuk mendapatkan objek<sup>7</sup>. Menurut terminologi, heuristik dalam bahasa Yunani *Heuristiken* adalah mengumpulkan sumber atau menemukan sumber<sup>8</sup>.

Dalam artian lain Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah untuk berburu dan mengumpulkan berbagai sumber data terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Misalnya melakukan penelusuran sumber sejarah dengan meneliti berbagai dokumen, mengunjungi situs sejarah, mewawancarai para saksi sejarah. Sumber sejarah ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah bukti-bukti yang

di tulis oleh tangan pertama mengenai sejarah, yang dibuat pada waktu peristiwa tersebut terjadi oleh orang yang terlibat atau hadir pada peristiwa tersebut. Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa dokumen sebagai sumber primer yaitu laporan keuangan yang dikeluarkan Escomptobank NV. tahun 1955, tahun 1956 dan tahun 1958. Peneliti juga menggunakan beberapa surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Serikat Buruh Tambang Indonesia yang dikeluarkan untuk mendesak pemerintah agar segera mengambil alih aset Belanda yang ada di Indonesia.

Sumber sekunder merupakan bukti-bukti sejarah yang berupa tulisan mengenai sejarah berdasarkan bukti-bukti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku diterbitkan oleh bank mandiri yang berjudul *Bank Dagang Negara Asa Membangun Bangsa tahun 1960-1999* sebagai sumber sekunder dalam penelitian. Buku ini menjelaskan tentang sejarah mulai terbentuknya *Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij* hingga di merger menjadi Bank Mandiri. Metode setelah heuristik ialah Interpretasi atau tafsir. Untuk menghasilkan cerita sejarah, fakta yang sudah dikumpulkan harus diinterpretasikan atau di tafsirkan<sup>9</sup>.

Fakta dan sumber sejarah yang sudah dikumpulkan dianalisis kembali, dan dicari keterkaitannya dengan fakta-fakta yang lainnya untuk mendukung penelitian. Metode terakhir ialah Historiografi. Historiografi merupakan merekonstruksi masa lampau berdasarkan fakta yang telah ditafsirkan dalam bentuk tulisan sesuai dengan penulisan sejarah yang benar<sup>10</sup>. Pada metode ini peneliti akan menyajikan sebuah tulisan sejarah berjudul "Perubahan Escomptobank NV. menjadi PT. Escomptobank tahun 1955-1958" dengan tatanan bahasa Indonesia yang baik dan benar

## PEMBAHASAN

### A. Keadaan Ekonomi

Pada Tahun 1950 perekonomian Indonesia belum juga membaik, impian untuk mewujudkan kesejahteraan ekonomi sebagai hasil dari diakuinya kedaulatan politik belum juga tercapai. Selain itu tuntutan dari Pemerintah Belanda bahwa Indonesia harus membayar hutang sebesar 4,5 Milyar gulden sesuai dengan hasil KMB yang awalnya 6 milyar gulden harus tetap dilaksanakan. Pembayaran itu terus berjalan hingga tahun 1954, ketika pembayaran sudah mencapai 4 milyar gulden di hentikan oleh Presiden Soekarno. Pada tahun 1951 pendapatan perkapita orang Indonesia hanya 28,3 gulden, yang berarti lebih rendah dari pada pendapatan perkapita ketika di bawah

<sup>7</sup> Suhartono W Pranoto, *Teori dan Metodologi Sejarah*, (Jogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.11

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm., 29.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm., 55

<sup>10</sup> Louis Gotschak, *Mengerti Sejarah*, (Jakarta : UI Press, 1986), hlm. 36



pemerintahan Hindia-belanda (1930), yaitu sebesar 30 gulden<sup>11</sup>. Dengan kemerosotan ekonomi, program Pembangunan ekonomi seperti yang terencana pada Rencana Urgensi Perekonomian(RUP) dan program ekonomi Benteng dilaksanakan dalam kondisi ekonomi dengan tingkat kemakmuran yang rendah.<sup>12</sup>

Selain karena kemerosotan ekonomi dalam pendapatan perkapita orang Indonesia, kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi sebagai bukti dari kedaulatan politik ialah aparaturnya Negara yang kurang berpengalaman dalam melaksanakan dan mengawasi program tersebut. meskipun setiap pergantian pemerintahan selalu memiliki usaha yang berbeda-beda untuk memperbaiki dan mewujudkan sistem perekonomian nasional secepatnya, namun pada periode parlementer jalan perubahan struktur ekonomi lebih bersifat Evolusioner ketimbang Revolusioner<sup>13</sup>. Untuk Negara yang baru saja tumbuh dan berkembang Indonesia wajar saja jika banyak sekali tenaga kerja yang kurang berpengalaman. Di masa sebelumnya rakyat lebih banyak di pekerjaan secara paksa tanpa di latih, dan fokus untuk merebut negaranya kembali, yang mampu mengenyam pendidikan hanyalah rakyat-rakyat tertentu.

Pada tahun 1950-an masyarakat mulai mengenal giro, tabungan, dan deposito dalam pengelolaan uang. Penanaman modal atau saham pada perusahaan Belanda juga mulai banyak dilakukan oleh masyarakat, hal itu dapat dilihat dari meningkatnya laporan simpanan masyarakat pada Bank Indonesia tahun 1953 yang berjumlah Rp 2637 juta, dan pada tahun 1959 meningkat menjadi Rp 7695 juta. Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang keuntungan yang dapat dari bursa efek, padahal keuntungan yang dapat lebih tinggi daripada menabung dan membeli barang. Saham Escomptobank NV merupakan saham yang paling utama di Bursa efek pada tahun 1953, dengan jumlah kurang lebih Rp 4 juta di bursa efek Jakarta. Namun pemahaman masyarakat mengenai keuntungan bursa efek yang kurang membuat pendapatan dari bursa efek menurun dan sedikit.

Pada tahun 1952-1953, pemerintah memberikan anggaran bagi pelaksanaan Rencana Urgensi Perekonomian(RUP) ditetapkan sekitar Rp. 160 Juta dan dimaksudkan untuk membangun perusahaan dan pabrik-pabrik secara bertahap<sup>14</sup>.

Sedangkan Industri kecil diberi anggaran yang tidak begitu besar hanya Rp. 30 juta. Sehingga secara umum hasil yang dicapai dalam pelaksanaan RUP, sangatlah minim dan lamban. Pembangunan pabrik-pabrik juga mulai berjalan, pembiayaannya di salurkan melalui Bank Industri Negara (BIN) dana berasal dari patungan pemerintah dan swasta. Pabrik-pabrik yang di bangun oleh Negara nanti akan diserahkan kepada koperasi-koperasi swasta yang manajemennya gabungan dari swasta dan Negara, namun pemerintah tetap sebagai pemilik dan bertanggung jawab pada pelaksanaannya.

Pada KMB penyelesaian mengenai Irian Barat memang sudah di perkirakan selesai dalam satu tahun, namun kenyataannya belum juga selesai. Masalah Irian Barat menjadi suatu masalah yang sensitive, dan bisa memicu konflik terbuka sewaktu-waktu. Pada tanggal 29 September 1954, sidang umum PBB yang ke-9 di gelar. Hal itu di manfaatkan Indonesia untuk mengajukan memorandum pada Belanda mengenai masalah Irian Barat. Masalah Irian Barat di bicarakan pada sidang umum PBB tahun 1954 namun belum juga menemui titik terang. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mengembalikan kembali Irian Barat menjadi wilayah Indonesia. Bahkan pada April 1955 digelar Konferensi Asia-Afrika yang bertujuan untuk mencari dukungan, dan pada akhir konferensi Negara-negara Asia-Afrika memberikan dukungannya pada Indonesia<sup>15</sup>. Usaha-usaha tersebut tetap dianggap gagal, karena untuk mengajukan memorandum di sidang PBB tidak hanya harus mendapatkan dukungan dari Asia dan Afrika. Namun juga harus mendapatkan dukungan dari Negara Blok Barat yang sudah di dapatkan. Pada tahun 1957 juga masih dilakukan berbagai usaha untuk mendapatkan kembali Irian Barat ke tangan Indonesia. Puncaknya terjadi pada tanggal 29 November 1957, sebelum pemutihan suara di gelar. Ir. Soekarno selaku presiden Indonesia masa itu memberi peringatan pada pihak Belanda, bahwa pemerintah Indonesia akan mengambil langkah yang akan menggoncangkan Dunia apabila resolusi tersebut tetap gagal<sup>16</sup>. Sebagai bukti dari apa yang di katakan oleh presiden Soekarno, pada tanggal 1 Desember 1957 Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan aksi mogok selama 24 jam terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia<sup>17</sup>. Tindakan tersebut adalah awal dari wujud usaha menasionalisasikan perusahaan Belanda di Indonesia.

<sup>11</sup>Syahrir, 1986. *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok, sebuah Tinjauan Prospek*. Jakarta:LP3ES. Hlm73.

<sup>12</sup>Ginting Budiman, "Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi di Indonesia", *Jurnal Equality*, Vol.12 No. 2 Agustus 2007, Hlm103

<sup>13</sup>Ibid. Hlm103

<sup>14</sup>Muhaimin, A. Yahya, 1991. *Bisnis dan Politik; Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta:LP3ES, Hlm73.

<sup>15</sup> Ibid. Hlm.186.

<sup>16</sup> Jones, Howard Palfrey, 1986. *Australia dan Revolusi Indonesia*, Jakarta:PT Panji Simpati. Hlm184-185

<sup>17</sup> Barlett, Anderson G., et all, 1986. *Pertamina: Indonesia Nasional Oil*, Jakarta, Singapore, Tulsa: Amerasian Ltd. Hlm.100.

## B. NASIONALISASI ESCOMPTOBANK N.V

Hasil KMB membuat perusahaan ini terus beroperasi seperti biasanya, memberikan kredit pada perusahaan lokal di Indonesia. Dengan masih beroperasinya perusahaan asing di Indonesia membuat perusahaan lokal tidak berkembang terlalu pesat dan perekonomian masih belum stabil. Selain untuk meningkatkan perekonomian, menasionalisasikan perusahaan asing juga merupakan bentuk protes pemerintah terhadap Belanda agar mengembalikan Irian Barat ke tangan Indonesia. Usaha pemerintah untuk menasionalisasikan perusahaan Belanda agar perekonomian Indonesia membaik diawali dengan mengeluarkan peraturan untuk bank swasta nasional wajib mengajukan permohonan izin sementara. Peraturan tersebut di mulai dari tanggal 1 Januari 1955, Sehingga mulai tahun 1955 Escomptobank NV. mengeluarkan laporan keuangan masih dalam bahasa Belanda.

Sebagai salah satu perusahaan asing yang memiliki perhatian khusus pada Indonesia, permintaan tentang permohonan izin usaha oleh Menteri Keuangan di sambut baik oleh perusahaan ini, hal itu tertulis dalam sebuah surat di laporan keuangan Escomptobank NV tahun 1955. Semua hal yang di lakukan untuk menyesuaikan perusahaan dengan peraturan pemerintah dalam usaha menasionalisasikan perusahaan. Escomptobank NV. dinasionalisasikan pada tahun 1958, karena menurut Undang-undang(UU) No. 86 tahun 1958 tanggal 27 Desember 1958 yang diberlakukan surut sampai dengan 3 Desember 1957. Adapun maksud dari pemerintah ialah menasionalisasikan masing-masing bank dengan peraturan pemerintah, setelah itu pemerintah membuat bank milik Negara untuk menerima aktiva dan pasiva perusahaan tersebut. Setelah dinasionalisasikan tenaga-tenaga Indonesia sudah bisa menggantikan tenaga asing. Selain itu para pengurus bank ini juga menggelar rapat perubahan anggaran dasar perusahaan, dalam rapat tersebut di putuskan bahwa nama Escomptobank NV diganti menjadi PT Escomptobank. Pada maret 1958 pimpinan tertinggi bank dipercayakan kepada putera Indonesia. Berikut merupakan susunan Dewan pengurus Escomptobank setelah dinasionalisasikan, Mr. RM. Sumanang sebagai ketua Dewan Komisaris, M.A. Alatas sebagai Wakil Ketua Dewan Komisaris, serta M.N.M. Hasyim Ning dan E. Pondaag masing-masing sebagai Anggota. Jabatan sebagai Direktur dijabat oleh J.D. Massie serta Tan Tjin Tong dan Suroso BA masing-masing sebagai Direktur Muda. Pada tanggal 26 Agustus 1958 Dewan komisaris melakukan Rapat Anggaran Dasar yang menetapkan Pengurus Perusahaan wajib berkewarganegaraan Indonesia, dan nama Escomptobank NV diganti menjadi PT Escomptobank. Status perusahaannya juga diganti

menjadi persero terbatas, kantor cabang yang ada di Belanda di putuskan hubungannya. Selain kepegawaian yang di ganti menjadi warga Indonesia, bahasa yang di gunakan untuk menulis laporan keuangan juga diganti menjadi bahasa Indonesia. PT Escomptobank resmi dinasionalisasikan pada April 1960, melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No. 13 Tahun 1960, lalu namanya di ubah menjadi Bank Dagang Negara terhitung mulai 11 April 1960.

Anggaran Dasar Escomptobank diubah melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanggal 18 November 1958. Dewan komisaris dan direksi PT Escomptobank di Jakarta, yang semuanya Warga Negara Indonesia asli, diberi kekuasaan lebih banyak atas dewan pengawas/pemimpin cabang dari kantor-kantor Escomptobank di luar negeri. Saham-saham PT Escomptobank yang telah dikeluarkan atas unjuk, harus diubah menjadi atas nama.

Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953, Setelah dikeluarkannya Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, Bank Indonesia sebagai lembaga yang sangat berkepentingan dengan lahirnya ketentuan tentang pengawasan bank telah melakukan penelitian dan pengkajian atas ketentuan serupa yang berlaku di berbagai negara, terutama negeri Belanda. Agar jumlah bank-bank swasta tidak bertambah terus menerus dengan tidak diawasi, maka mulai tanggal 1 Januari 1955 dinyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1, untuk mengatur pengawasan atas kredit di Indonesia. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pengawasan terhadap semua bank umum dan bank tabungan yang beroperasi di Indonesia oleh Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas bank-bank dan guna kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat. Setelah dikeluarkannya PP No.1 Tahun 1955, bank-bank swasta nasional yang telah ada dalam waktu tiga bulan wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan melalui Bank Indonesia. Bila syarat-syarat untuk memperoleh izin belum dipenuhi, maka Menteri Keuangan akan memberikan izin sementara.

Menteri Keuangan memberikan izin tetap atas rekomendasi Bank Indonesia. Sejumlah bank masih belum mendapat izin karena persyaratan permodalan yang belum dapat mereka penuhi.

Sehubungan dengan itu, Dewan Moneter memutuskan untuk memperpanjang waktu berlakunya izin sementara satu tahun lagi, dengan harapan agar supaya bank-bank yang sungguh-sungguh memperlihatkan manfaatnya bagi masyarakat mempunyai kesempatan untuk memenuhi modal yang disyaratkan.

## KESIMPULAN

Keinginan pemerintah untuk segera mewujudkan kesejahteraan Ekonomi sebagai wujud dari kedaulatan politik tidak mudah di capai oleh bangsa Indonesia yang baru saja terlepas dari jajahan. Untuk meningkatkan perekonomian pemerintah membentuk lembaga-lembaga penelitian untuk membantu pengusaha melakukan uji kelayakan perhitungan teknis atau laporan keuangan.

Selain membentuk lembaga-lembaga pemerintah juga melakukan kebijakan lain yaitu menasionalisasikan perusahaan asing. Salah satu perusahaan asing yang dinasionalisasikan ialah Escomptobank NV. . Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan asing yang berkembang di Indonesia. Keberadaan perusahaan ini juga membantu kemajuan perekonomian Indonesia. Mulai dari pengurusan surat berharga perusahaan, hingga kredit. Selain itu perusahaan ini juga Indonesiasi, jadi ketika perusahaannya dinasionalisasikan tenaga Indonesia sudah siap menggantikan tenaga Asing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Arsip

Surat Pernyataan dari Serikat Buruh Tambang, tentang pembebasan Wilayah Irian Barat

Lembar Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960 No.35) Tentang Penentuan Perusahaan Bank Di Indonesia Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi.

Laporan Keuangan Escomptobank NV. tahun 1956

Buku Pokok Bank Mandiri ,Bank Dagang Negara; Asa Membangun Bangsa, 2016

### Buku

Hutagalung, Batara R. ,2010. *Serangan Umum I Maret 1949*, Yogyakarta: LKis

Booth, Anne, William J.O. Malley, Anna Weidemann. 1988, *Sejarah Ekonomi Indonesia*, Jakarta: LP3S.

Nasution, 2006, *Ekonomi Surabaya Pada Masa Kolonial (1830-1930)*, Surabaya: Intelektual.

J. Thomas Lindblad, 1994, *The Contribution of Foreign Trade to Colonial State Formation in Indonesia 1900-1930, dalam Political And Economic Foundations of*

*The Netherlands Indies 1880-1942*, Leiden : KITLV Press.

Suhartono W Pranoto ,2010, *Teori dan Metodologi Sejarah*, Jogjakarta: Graha Ilmu.

Louis Gotschak, 1986 . *Mengerti Sejarah*, Jakarta : UI Press.

Purnawan Basundoro. 2012. *Pengantar Sejarah Kota*. Yogyakarta: Ombak.

Sri Retna Astuti. Dwi Ratna Nurhajarini. Nurdianto, 2016, *Pembangunan Pelabuhan Surabaya Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Di Sekitarnya Pada Abad XX* ,Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

Purnawan Basundoro. 2012. *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Hingga Masa Reformasi 1906-2012*. Surabaya: Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga dan Badan Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya.

Syahrir, 1986. *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok, sebuah Tinjauan Prospektif*. Jakarta: LP3ES.

Pelzer, Karl J., 1991, *Toeang Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria di Sumatera Timur 1863-1947*, Alih Bahasa: J. Rumbo, Jakarta: Sinar Harapan.

Chalmers, Ian., 1996. *Konglomerasi Negara dan Modal Dalam Industri Otomotif Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siahaan, Bisuk, 1996. *Industrialisasi di Indonesia: Sejak Hutang Kehormatan Sampai Banting Stir*, Jakarta: Pustaka Data.

Hill, Hal, 1990. *Investasi Asing dan Industrialisasi di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.

Muhaimin, A. Yahya, 1991. *Bisnis dan Politik; Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, Jakarta: LP3ES,

Ricklefs, M.C., 1991. *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Jones, Howard Palfrey, 1986. *Australia dan Revolusi Indonesia*, Jakarta: PT Panji Simpati.

Barlett, Anderson G., et all, 1986. *Pertamina: Indonesia Nasional Oil*, Jakarta, Singapore, Tulsa: Amerasian Ltd.

Kahin, Andrey R, dan George McT Kahin, 1997. *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Pigay, BIK, dan Decki Natalis, 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik di Papua*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

### Jurnal

Andrian Clemend, J. Thomas Lindblad, Jeroen Touwen, 1992, *Changing Economy in Indonesia*, Vol. 12 b, (Amsterdam: Royal Tropical Institute, 1992),



Ginting Budiman, "Refleksi Historis Nasionalisasi Perusahaan Asing di Indonesia: Suatu Tantangan Terhadap Kepastian Hukum Atas Kegiatan Investasi di Indonesia", *Jurnal Equality*, Vol.12 No. 2 Agustus 2007,

<https://achmadrizal.staff.telkomuniversity.ac.id/bank-escompto-bank-dagang-negara-sampai-bank-mandiri/>

[https://www.kompasiana.com/jelajah\\_nesia/552e29cc6ea83417128b457f/jejak-sejarah-bank-mandiri-di-surabaya](https://www.kompasiana.com/jelajah_nesia/552e29cc6ea83417128b457f/jejak-sejarah-bank-mandiri-di-surabaya)

